SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 178 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNA SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : Bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Pengguna Barang Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Pengguna Sementara Barang Milik Daerah Provinsi Papua Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

11. Peraturan Menteri...../3

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Status Pengguna Sementara Barang Milik Daerah Provinsi Papua Tengah.

KEDUA : Objek barang yang digunakan sementara oleh Pengguna Barang Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pengguna sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban:

a. melakukan pengamanan, pemeliharaan dan mengecek kondisi kendaraan baik itu interior, eksterior maupun mesin;
b. menghadirkan Kendaraan pada saat dilaksanakan Pemeriksaan oleh Bidang Aset, Tim Pemeriksa dan atau Pihak Lainnya yang menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
c. menyerahkan kembali Kendaraan melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dalam keadaan baik dan berfungsi, apabila:
   1. mutasi;
   2. pensiun;
   3. promosi;
   4. tidak menduduki jabatan;
   5. meninggal dunia;

KEEMPAT...../4

KEEMPAT : Pengguna Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang :
a. menjual kendaraan;
b. menggadaikan kendaraan;
c. menyewakan kendaraan;
d. mengkomersilkan kendaraan untuk kepentingan pribadi;
e. merusak GPS yang ada dalam kendaraan;
f. merubah bentuk dan fungsi kendaraan.

KELIMA : Apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEMPAT, Pemerintah Daerah berhak untuk:
a. menempuh jalur hukum dengan melaporkan kepada Penegak Hukum;
b. melakukan pemotongan terhadap penghasilan berdasarkan kerugian yang ditimbulkan;
c. melalui bidang Aset akan melakukan penarikan terhadap kendaraan tersebut.

KEENAM : Apabila kendaraan hilang/dicuri karena kelalaian, akan diproses dan ditindaklanjuti oleh Majelis TP-TGR.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 20 Oktober 2023

Pj.GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 178 TAHUN 2023
TANGGAL : 20 OKTOBER 2023

PENETAPAN STATUS PENGGUNA SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN	MERK MOBIL	NO. RANGKA	NO.POLISI
1	Dr. RIBKA HALUK, S.Sos., M.M	PJ. GUBERNUR	ALPHARD 2.5	JTNGF3DH6N8039954	PA 1542 KZ
			FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR SPORT	MHFBA3FS2P1052061	PA 1042 KZ
			HILUX DOUBLE CABIN 2.4 DIESEL	MR0KB8CD4N1140443	PA 8203 KZ
			INNOVA ZENIX BENSIN	MHFAAAAA0P0006426	PA 1544 KZ
			INNOVA ZENIX BENSIN	MHFAAAAA3P0007537	PA 1547 KZ
2	ANWAR HARUN DAMANIK, S.STP., M.M	PJ. SEKRETARIS DAERAH	FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR SPORT	MHFBA3FS4P1052160	PA 1043 KZ
			INNOVA ZENIX BENSIN	MHFAAAAA6P0014322	PA 1552 KZ
3	AUSILIUS YOU, S.Pd.,MM.,MH	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAJERO SPORT GLS/JEEP	MK2KSWMDNPJ000479	PA 1006 PH
4	ANWAR HARUN DAMANIK, S.STP., M.M	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PAJERO SPORT GLS/JEEP	MK2KSWMDNPJ000490	PA 1008 PH
5	ELISABETH CENAWATIN, SE, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	PAJERO SPORT GLS/JEEP	MK2KSWMDNPJ000532	PA 1005 PH
6	UKKAS, S.Sos.,M.KP	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN, SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGEMBANGAN OTONOMI KHUSUS	FORTUNER 4X2 G DIESEL	MHFJB8GS8P1592213	PA 1045 KZ
7	BENJAMIN G. LEKATOMPESSY, SP	STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	FORTUNER 4X2 G DIESEL	MHFJB8GS7P1592221	PA 1060 KZ
8	BERNARD SITORUS, ST	Plt. KEPALA BIRO UMUM	INNOVA ZENIX BENSIN	MHFAAAAA0N0003779	PA 1545 KZ
9	DANIEL PANCA PASANDA, AP, M.Si	Plt. KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	INNOVA ZENIX BENSIN	MHFAAAAA6N0004371	PA 1548 KZ
10	YOHANES YOU, S.Ag, M.Hum	Plt. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	INNOVA ZENIX BENSIN	MHFAAAAA0P0014350	PA 1550 KZ

11	MENASE YOTENI, SH, M.Si	Plt. KEPALA BIRO HUKUM	INNOVA ZENIX BENSIN	MHFAAAAA1N0003550	PA 1549 KZ
12	LAMBERTUS WAKERKWA, S.Sos	Plt. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	INNOVA ZENIX BENSIN	MHFAAAAA1P0007455	PA 1546 KZ
13	MENASE KAIDEPA, SE, M.Si	Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI	INNOVA ZENIX BENSIN	MHFAAAAA7P0014345	PA 1551 KZ
14	Ir. SYAHRIAL, MM	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T GR SPORT	MHFAA8GS3P0905189	PA 1056 KZ
15	Drs. SEMUEL RIHI, M.Si	INSPEKTUR	FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T GR SPORT	MHFAA8GS4P0904536	PA 1050 KZ
16	FRETS JAMES BORAY, SE, M.Si	Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T GR SPORT	MHFAA8GS0P0904999	PA 1057 KZ
17	HAM NAWIPA	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T GR SPORT	MHFAA8GS3P0904169	PA 1041 KZ
18	ZAKHARIAS F. MAREI, S.Sos, M.MT	Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T GR SPORT	MHFAA8GS0P0903948	PA 1038 KZ
19	YAN UKAGO, ST, MT	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	HILUX DOUBLE CABIN 2.4 DIESEL	MR0KB8CD6N1139164	PA 8020 KZ
20	dr. SILWANUS A SUMULE, Sp.OGn MH.Kes	KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T GR SPORT	MHFAA8GS0P0904534	PA 1055 KZ
21	VICTOR FUN, S.Sos, M.Si	Plt. KEPALA DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATPOL PP	FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T GR SPORT	MHFAA8GS5P0904500	PA 1059 KZ
22	FRENCE THE PAPARA, SIP, MAP	KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T GR SPORT	MHFAA8GS3P0903846	PA 1040 KZ
23	Drs. THEPHILUS LUKAS AYOMI	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T GR SPORT	MHFAA8GS0P0904601	PA 1053 KZ
24	YOPI MURIB, SE, MM	Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T GR SPORT	MHFAA8GS9P0904497	PA 1054 KZ
25	MARTEN UKAGO, SE, M.Si	Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T GR SPORT	MHFAA8GS8P0904541	PA 1058 KZ

26	YAN RICHARD PUGU, S.Hut, M.Si	Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T GR SPORT	MHFAA8GSXP0903603	PA 1039 KZ
27	NORBERTUS MOTE, SE, M.Si	Plt. KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T GR SPORT	MHFAA8GS0P0905070	PA 1046 KZ
28	DIANA SERILA YOUW, S.Sos, M.Si	Plt. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T GR SPORT	MHFAA8GSXN0791771	PA 1035 KZ
29	Dr. MARTHA PIGOME, SH, M.Hum	SEKRETARIS DPRP	FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T GR SPORT	MHFAA8GS0P0904503	PA 1052 KZ
30	DANIEL MAIPON, S.STP	Plt. SEKRETARIS MRP	FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T GR SPORT	MHFAA8GS3P0905337	PA 1047 KZ
31	NENO TABUNI, S.Sos	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T GR SPORT	MHFAA8GS2P0904583	PA 1049 KZ
32	JULL EDY WAY, S.Sos	Plh. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T GR SPORT	MHFAA8GS5P0904545	PA 1051 KZ
33	ROLAND JAMES, S.STP, MM	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T GR SPORT	MHFAA8GS8P0904538	PA 1048 KZ

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006